



Optimalisasi Verifikasi Data Bantuan Sosial Melalui Aplikasi Cek Bansos di Dusun Sekaran

Amalia Nabila¹, Risma Zukhrofatul Azizah², Dewi Rahmawati³, Muhammad Maulana Arimana Sikana⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk
amalianabila@gmail.com¹, rismazukhrofatulazizah06@gmail.com²,
dewirahma31@gmail.com³, maulanaarimana11@gmail.com⁴

ABSTRACT

©2025 The Author(s):
This is an open-access
article distributed.

Social assistance programs are government initiatives aimed at supporting underprivileged communities in fulfilling their basic needs and improving social welfare. However, inaccurate beneficiary data often results in mistargeted distribution, social jealousy, and declining public trust. This community service activity focuses on improving the accuracy and transparency of social assistance data verification in Dusun Sekaran through the utilization of the Cek Bansos application and educational assistance for RT/RW. The method used is a qualitative descriptive approach, starting with the collection of population administrative data in the form of Family Cards (KK), followed by checking the social assistance status through the Cek Bansos application, data analysis, and digital literacy education for RT/RW. The results show that only a small portion of the collected KK data appeared in the application, indicating that most residents were not registered as beneficiaries because they were categorized as economically capable. The application proved effective in accelerating verification, increasing transparency, and reducing administrative errors. Furthermore, educational activities improved the understanding and independent verification capacity of RT/RW. Overall, the integration of digital applications and community-based education strengthens the social assistance data system to be more accurate, transparent, and targeted.

Keyword :

Social assistance; Data verification; Digital transformation

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Permasalahan pendataan penerima bantuan sosial yang tidak akurat sering menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, kecemburuan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi verifikasi data penerima bantuan sosial di Dusun Sekaran melalui pemanfaatan aplikasi Cek Bansos dan edukasi kepada RT/RW. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan pengumpulan data administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), pengecekan status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos, analisis hasil verifikasi, serta pendampingan edukatif kepada RT/RW. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil data KK yang

muncul dalam aplikasi karena sebagian besar warga tergolong masyarakat mampu dan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Penggunaan aplikasi terbukti mempercepat proses verifikasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan administrasi. Selain itu, edukasi kepada RT/RW meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam melakukan pengecekan data secara mandiri sehingga sistem pendataan bansos menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Kata kunci:

Bantuan sosial; Verifikasi data; Transformasi digital.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program bantuan sosial menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Penyaluran bansos yang tepat sasaran sangat penting agar manfaat bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, pendataan penerima bantuan sosial seringkali mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang umum terjadi antara lain adanya data penerima yang tidak sesuai kondisi terbaru, penerima bantuan yang sebenarnya sudah mampu, adanya warga yang layak tetapi belum terdata, serta ketidaksesuaian data antara pemerintah desa dengan data pusat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya ketidakpuasan masyarakat, kecemburuan sosial, bahkan menurunnya kepercayaan warga terhadap sistem penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, proses pendataan dan verifikasi data penerima bansos harus dilakukan secara teliti, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak yang berwenang.

Dalam upaya meningkatkan akurasi pendataan, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai alat pendukung verifikasi data. Salah satu inovasi yang digunakan adalah aplikasi Cek Bansos, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pengecekan informasi penerima bantuan sosial secara lebih cepat dan transparan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat maupun aparat desa dapat memantau data penerima bantuan dan memastikan apakah seorang warga telah terdaftar sebagai penerima atau belum. Pemanfaatan aplikasi Cek Bansos dinilai mampu membantu memperbaiki sistem pendataan agar lebih efektif dan mengurangi kesalahan administrasi.

Meskipun demikian, penggunaan aplikasi digital dalam proses verifikasi bansos tidak dapat berjalan secara maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Di tingkat dusun atau desa, RT/RW menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi ekonomi warganya. Oleh karena itu, RT/RW memiliki peran penting dalam pendataan, pembaruan data, serta penyampaian informasi mengenai bansos. RT/RW juga menjadi ujung tombak dalam menilai kelayakan warga penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Selain RT/RW, peran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) juga dapat berkontribusi dalam penguatan sistem pendataan bansos, terutama dalam bentuk koordinasi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat

mengenai mekanisme bantuan sosial dan pemanfaatan aplikasi Cek Bansos. PPKM sebagai unsur yang memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan masyarakat dapat berperan dalam membantu memastikan pendataan bansos berjalan lebih tertib dan terorganisir. Kolaborasi antara PPKM dan RT/RW menjadi langkah penting dalam menciptakan pendataan bansos yang lebih transparan dan akurat.

PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses verifikasi data penerima bantuan sosial di Dusun Sekaran. Pelaksanaan penelitian diawali dengan pengumpulan data administrasi kependudukan warga berupa Kartu Keluarga (KK) sebagai sumber data utama untuk memastikan identitas dan informasi keluarga yang akan diverifikasi. Data KK yang telah terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengecekan status bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos. Proses pengecekan dilakukan dengan memasukkan data identitas warga sesuai informasi pada KK serta menyesuaikan wilayah administratif yang tercantum dalam sistem aplikasi. Selanjutnya, hasil pengecekan yang muncul pada aplikasi dianalisis untuk mengetahui status warga, apakah telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau belum. Hasil tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan data verifikasi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai ketepatan sasaran penerima bantuan sosial di Dusun Sekaran.



Gambar 1. Kegiatan Verifikasi Data Bantuan Sosial di Dusun Sekaran

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas tim pengabdian masyarakat yang sedang melakukan verifikasi data bantuan sosial dengan memeriksa dokumen Kartu Keluarga (KK) dan mencocokkannya melalui perangkat laptop menggunakan aplikasi Cek Bansos. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial berdasarkan data

administrasi yang valid. Selain itu, aktivitas ini juga mencerminkan proses pendampingan digital dan kerja kolaboratif dalam meningkatkan transparansi, ketepatan sasaran, serta efisiensi proses pendataan bantuan sosial di tingkat dusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Dusun Sekaran, tahapan awal yang dilakukan adalah pengumpulan data administrasi warga berupa Kartu Keluarga (KK). Pengumpulan KK ini bertujuan untuk memperoleh informasi identitas warga secara lengkap, sehingga proses pengecekan data bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sesuai data kependudukan yang valid. Data KK yang telah terkumpul kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan verifikasi penerima bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, proses pengecekan dilakukan dengan memasukkan data wilayah administratif dan identitas warga sesuai dengan KK yang dikumpulkan, kemudian sistem akan menampilkan informasi terkait status penerimaan bantuan sosial.

Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa tidak semua KK yang dikumpulkan dapat ditampilkan dalam aplikasi Cek Bansos. Dari seluruh data KK yang dihimpun, hanya beberapa KK yang muncul informasinya pada aplikasi, sedangkan sebagian besar KK lainnya tidak dapat dicek atau tidak menampilkan data penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa data warga yang tidak muncul dalam aplikasi kemungkinan besar tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Hal tersebut terjadi karena banyak warga di Dusun Sekaran yang tergolong dalam kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak terdaftar dalam sistem bantuan sosial yang tercatat dalam aplikasi Cek Bansos. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan bahwa aplikasi Cek Bansos secara otomatis hanya menampilkan data keluarga yang memang telah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial atau terdaftar dalam basis data kesejahteraan masyarakat.

Meskipun hanya beberapa KK yang berhasil dicek, data yang muncul dalam aplikasi memberikan informasi yang cukup penting dalam proses verifikasi. Informasi tersebut berupa status penerimaan bantuan sosial, kategori bantuan yang diterima, serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan data kesejahteraan keluarga. Hasil pengecekan ini kemudian dicatat dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam menentukan validitas penerima bansos di Dusun Sekaran. Selain itu, hasil verifikasi melalui aplikasi juga membantu dalam melihat kesesuaian antara data yang ada di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem. Hal ini menjadi langkah penting karena pendataan bantuan sosial tidak hanya memerlukan data administratif, tetapi juga membutuhkan pembuktian melalui pengecekan sistem agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa aplikasi Cek Bansos dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan sosial, karena informasi dapat diperoleh secara langsung tanpa harus menunggu proses pendataan manual yang memakan waktu lebih lama. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan data KK tertentu tidak dapat ditampilkan, seperti keterbatasan jaringan internet, kesalahan input data, serta kemungkinan adanya perbedaan penulisan identitas warga antara data KK dengan data yang tercatat di sistem aplikasi. Kendala tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi bansos melalui aplikasi tetap memerlukan ketelitian dan pendampingan agar hasil pengecekan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.

Setelah proses pengecekan data dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada RT/RW mengenai penggunaan aplikasi Cek Bansos. Edukasi ini dilaksanakan karena RT/RW merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam pendataan warga dan menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi bantuan sosial kepada masyarakat. Materi edukasi yang diberikan meliputi cara mengakses aplikasi, langkah memasukkan identitas warga, pemilihan wilayah administratif yang sesuai, serta cara membaca dan memahami hasil yang ditampilkan oleh aplikasi. Kegiatan edukasi ini bertujuan agar RT/RW mampu melakukan pengecekan secara mandiri dan lebih memahami mekanisme verifikasi bantuan sosial berbasis digital.

Pelaksanaan edukasi tersebut memberikan dampak positif, karena RT/RW mulai memahami bahwa proses pendataan bansos saat ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga perlu didukung dengan sistem digital agar lebih transparan. Dengan meningkatnya pemahaman RT/RW dalam penggunaan aplikasi Cek Bansos, proses verifikasi data penerima bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan akurat. Selain itu, edukasi ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman serta kecemburuan sosial yang sering muncul akibat ketidaktahuan warga mengenai mekanisme penyaluran bansos.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Cek Bansos di Dusun Sekaran mampu membantu proses pengecekan dan verifikasi penerima bantuan sosial secara lebih sistematis. Walaupun hanya sebagian KK yang dapat ditampilkan karena faktor kategori ekonomi masyarakat yang tergolong mampu, aplikasi tetap memberikan manfaat besar dalam menampilkan data warga yang benar-benar terdaftar sebagai penerima bansos. Selain itu, edukasi yang dilakukan kepada RT/RW menjadi langkah penting dalam memperkuat peran mereka sebagai pendata dan penghubung utama antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dan peningkatan kemampuan RT/RW dalam penggunaan aplikasi, diharapkan proses pendataan dan verifikasi bansos di Dusun Sekaran dapat terus berkembang menjadi lebih akurat, transparan, serta mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Sekaran, penggunaan aplikasi Cek Bansos dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial membantu meningkatkan ketepatan dan transparansi pendataan. Pengumpulan data Kartu Keluarga (KK) menjadi dasar dalam pengecekan melalui aplikasi, meskipun tidak semua KK dapat ditampilkan karena sebagian warga tergolong masyarakat mampu dan tidak terdaftar dalam sistem bantuan sosial. Selain itu, kegiatan edukasi kepada RT/RW mengenai penggunaan aplikasi Cek Bansos memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam melakukan pengecekan data secara mandiri. Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi yang didukung peran aktif RT/RW dapat memperkuat sistem pendataan bansos agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Disarankan agar pembaruan data kesejahteraan masyarakat dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Selain itu, perlu adanya pelatihan lanjutan bagi RT/RW terkait penggunaan aplikasi Cek Bansos agar proses verifikasi dapat berjalan lebih efektif. Dukungan sarana dan

koordinasi yang baik antara RT/RW dan pemerintah desa juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa dan perangkat Dusun Sekaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua RT dan RW yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi data Kartu Keluarga (KK), serta mengikuti kegiatan edukasi penggunaan aplikasi Cek Bansos. Selain itu, penulis mengapresiasi seluruh warga Dusun Sekaran yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses verifikasi bantuan sosial berlangsung. Dukungan, kerja sama, dan partisipasi dari berbagai pihak tersebut sangat membantu kelancaran kegiatan sehingga tujuan pengabdian dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan ketepatan sasaran pendataan bantuan sosial dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Panduan Penggunaan Aplikasi Cek Bansos*. Jakarta: Pusdatin Kemensos.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.